

**COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF
DISTRICT AND CITY GOVERNMENTS IN NORTHERN KALIMANTAN
PROVINCE BEFORE AND AFTER REGIONAL EXPANSION**

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN DAERAH**

Bertilina Lina Kusrina¹, Fikriyyah Agustina², Gatot Subiyakto³, Ira Phajar Lestari⁴
Universitas Gunadarma^{1,2,3,4}

lkusrina@staff.gunadarma.ac.id¹, fikriyyahagustina@gmail.com²,
gsubiyakto@gmail.com³, ira_phajar@staff.gunadarma.ac.id⁴

ABSTRACT

One measure of how well newly independent regions manage their territories is how well they function financially. North Kalimantan Province was officially formed on November 16, 2012, with the signing of Law No. 20/2012 on the Establishment of North Kalimantan Province. The purpose of this study is to compare the financial performance of districts and cities in North Kalimantan Province before and after regional expansion (2010-2013) and after regional expansion (2014-2017). The research method used is quantitative method. The revenue growth ratio and PAD effectiveness ratio differ between before and after regional expansion, as determined by the Wilcoxon Signed Rank Test. Meanwhile, there is no difference between the ratio of regional financial dependence and regional financial independence, the degree of decentralization, or the degree of decentralization. Differences in the ratio of expenditure growth to GRDP, the compatibility of operating expenditure, and the compatibility of capital expenditure can be seen in the ratio of regional expenditure both before and after the division.

Keywords: *Financial Performance, Regional Expansion, Regional Autonomy, Local Revenue, Financial Gap*

ABSTRAK

Salah satu ukuran untuk melihat seberapa baik daerah-daerah yang baru saja merdeka mengelola wilayah mereka adalah seberapa baik mereka berfungsi secara finansial. Provinsi Kalimantan Utara secara resmi terbentuk pada tanggal 16 November 2012, dengan ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara sebelum dan sesudah pemekaran wilayah (2010-2013) dan setelah pemekaran wilayah (2014-2017). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio efektivitas PAD berbeda antara sebelum dan sesudah pemekaran daerah, sebagaimana ditentukan oleh *Wilcoxon Signed Rank Test*. Sementara itu, tidak ada perbedaan antara rasio ketergantungan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi, maupun derajat desentralisasi. Perbedaan rasio pertumbuhan belanja terhadap PDRB, keserasian belanja operasi, dan keserasian belanja modal dapat dilihat pada rasio belanja daerah baik sebelum maupun sesudah pemekaran. **Kata Kunci:** Kinerja Keuangan, Pemekaran Daerah, Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kesenjangan Keuangan

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pemekaran wilayah merupakan strategi untuk mendorong pertumbuhan yang adil dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Terdapat kekhawatiran di antara berbagai pemangku kepentingan mengenai kelayakan pencapaian tujuan pemekaran daerah, setelah 5 tahun pelaksanaannya. Kinerja keuangan daerah otonom baru (DOB) lebih rendah dibandingkan dengan daerah induknya, menurut data evaluasi tahun 2008 dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam kurun waktu 5 tahun, kinerja keuangan DOB menunjukkan tren yang konsisten, sedangkan kinerja keuangan daerah induk menunjukkan tren yang meningkat (Sidiq, 2016). Tingkat ketergantungan fiskal suatu daerah terhadap daerah induknya relatif lebih tinggi ketika tanggal lahir DOB diperhitungkan.

Penilaian kemajuan suatu daerah dapat diketahui dengan menganalisa APBD dan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) (Fitriyani, 2020). Efisiensi fiskal pemerintah daerah dapat dinilai dengan menganalisis pendapatan dan pengeluaran mereka. Para peneliti terdahulu telah melakukan berbagai macam eksperimen, dengan hasil yang beragam. Dengan menggunakan data sebelum dan sesudah pemekaran provinsi, Sucandrawati (2016) menganalisis kinerja Provinsi Lampung. Penelitiannya menemukan bahwa setelah pemekaran provinsi, biaya operasional sebagai persentase dari total biaya meningkat secara signifikan, sementara persentase pendapatan daerah sebagai persentase dari keseluruhan pendapatan sedikit menurun.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, UU No. 23/2014 menetapkan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pelaksanaan otonomi daerah melibatkan implementasi penataan daerah. Konsep penataan daerah mencakup dua komponen utama, yaitu pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Pemekaran dan penggabungan wilayah merupakan komponen utama dalam perencanaan regional. Istilah "pemekaran wilayah" mengacu pada praktik pemisahan sebuah negara bagian menjadi beberapa negara bagian, atau sebuah wilayah menjadi beberapa wilayah atau kota. Kebalikan dari pemekaran daerah adalah penggabungan daerah, yang melibatkan penyatuan kembali daerah-daerah yang sebelumnya terpisah. Peraturan Pemerintah No. 78/2007 mengizinkan pencabutan otonomi daerah jika ditentukan bahwa daerah yang bersangkutan tidak dapat secara efektif mengatur dan mengelola otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah melibatkan pelaksanaan penataan daerah. Konsep penataan daerah mencakup dua komponen utama, yaitu pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Beberapa tujuan yang tercantum dalam Pasal 31 UU No. 23/2014 antara lain untuk mencapai efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan standar pelayanan publik, meningkatkan daya saing bangsa dan daerah, serta menjaga keistimewaan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Pembentukan daerah adalah tindakan memberikan pengakuan hukum kepada daerah tertentu sebagai provinsi, kabupaten, atau kota. Pertumbuhan dan konsolidasi di tingkat daerah dapat menghasilkan pembentukan daerah yang diinginkan.

Pemerintah daerah diwajibkan oleh undang-undang ekonomi daerah untuk mempraktikkan manajemen fiskal yang terbuka dan jujur. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2007.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki serangkaian tanggung jawab dan hak yang dikenal sebagai keuangan daerah (Defitri, 2018). Semua bentuk kekayaan yang dianggap sebagai milik daerah termasuk dalam hak dan kewajiban ini, dan nilai uangnya dapat dihitung.

Status fiskal pemerintah daerah dapat ditunjukkan melalui berbagai dokumen keuangan, seperti neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Analisis laporan keuangan dilakukan dengan tujuan untuk menyajikan ringkasan kinerja keuangan yang komprehensif (Mahmudi, 2019). Penilaian kinerja keuangan di pemerintah daerah merupakan metrik penting untuk mengevaluasi efektivitas strategi manajemen dan akuntabilitas penyediaan layanan public (Syachbrani, 2013). Melalui pengukuran kinerja, pemerintah kota dapat menyandingkan tujuan kinerja dengan kinerja aktual, sehingga memfasilitasi penilaian yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

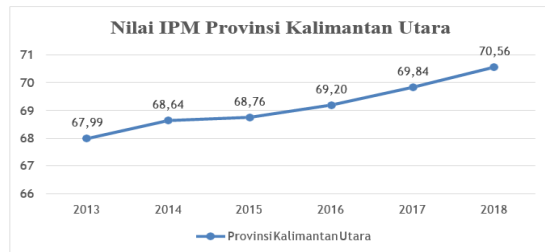
Berdasarkan tingkat kemiskinan, terdapat perbedaan yang cukup besar antara sebelum dan sesudah pemekaran untuk semua kabupaten, dan rasio pertumbuhan PDRB per kapita hanya berbeda secara signifikan di Kabupaten Puncak Jaya, berdasarkan studi pemekaran di wilayah Papua (Salim, 2019). Hal ini berarti bahwa pemekaran sudah mencapai sasaran yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan perubahan tingkat kemiskinan dari sebelum pemekaran. Pemekaran daerah juga diharapkan meningkatkan

kemandirian daerah yaitu kemandirian pemerintah daerah untuk mendapatkan penghasilan dan mengelola sendiri daerahnya. Hal ini terbukti pada hasil penelitian Putra & Hidayah (2020) pada provinsi Sumatera Selatan mendapatkan hasil bahwa Terdapat kesenjangan efisiensi antara periode sebelum dan sesudah pemekaran, yang diukur dengan rasio desentralisasi fiskal dan rasio kesesuaian belanja modal.

Pembentukan provinsi Kalimantan Utara sebagai entitas administratif yang berbeda dari provinsi Kalimantan Timur menjadikannya provinsi yang paling baru dibentuk di Indonesia, menempati posisi ke-34 di antara provinsi-provinsi di Indonesia. Provinsi ini terdiri dari lima wilayah administratif yang berbeda, khususnya empat kabupaten dan satu kota. Kabupaten dan kota yang disebutkan di atas sebelumnya merupakan bagian dari Kalimantan Timur. Namun, pada tahun 2013, mereka secara resmi dimasukkan ke dalam Provinsi Kalimantan Utara. Situs web Provinsi Kalimantan Utara (<https://kaltaraprov.go.id>) mencantumkan Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan sebagai bagian dari wilayah tersebut.

Meskipun merupakan provinsi yang baru saja terbentuk, Kalimantan Utara telah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sejak didirikan pada tahun 2013. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi sebagai metrik untuk mengevaluasi keberhasilan upaya-upaya yang dilakukan oleh suatu daerah untuk meningkatkan standar hidup penduduknya, atau untuk memastikan tingkat pembangunan relatif yang dicapai oleh daerah tersebut (Pamekas, 2013). Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2013-2018, seperti yang digambarkan dalam gambar 1. Pencapaian IPM di tahun 2018 menjadikan Provinsi Kalimantan Utara memperoleh peringkat kedua se-Kalimantan. Pencapaian tersebut telah melampaui 3 provinsi lainnya di Pulau Kalimantan.



Gambar 1. IPM Provinsi Kalimantan Utara

Tujuan dari investigasi ini adalah untuk menilai dan mengkaji potensi kesenjangan dalam hal kemampuan keuangan sebelum dan sesudah pemekaran kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara, yang ditentukan melalui analisis pendapatan dan belanja daerah.

METODE PENELITIAN

Kabupaten Bulungan dan Malinau di Provinsi Kalimantan Utara, serta Kabupaten Nunukan dan Tana Tidung, dan Kota Tarakan menjadi fokus investigasi ini. Secara historis, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kendali atas wilayah-wilayah kota tersebut. Namun, pada tahun 2013, mereka ditata ulang dan kemudian ditetapkan sebagai provinsi yang berbeda, yaitu Provinsi Kalimantan Utara.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara menyediakan data kuantitatif yang digunakan dalam analisis ini. Data tersebut mencakup tahun-tahun fiskal sebelum pemekaran daerah (2010-2013)

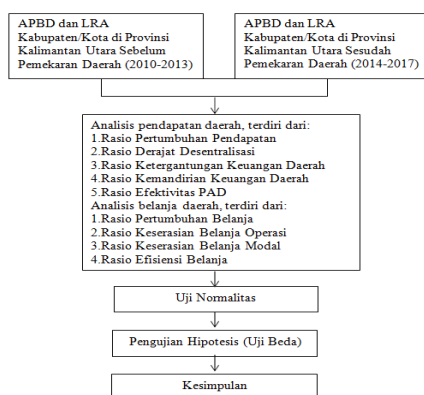
dan tahun-tahun fiskal setelah pemekaran daerah (2014-2017). Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi utama, yang diperoleh dari situs web resmi pemerintah, yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id.

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menentukan apakah data yang sedang diperiksa mengikuti distribusi normal atau tidak normal (Wisudaningtyas, 2022). Hal ini membantu peneliti memilih antara uji statistik parametrik dan non-parametrik, yang keduanya berguna dalam pengujian hipotesis. Dalam konteks pengujian hipotesis dengan uji statistik parametrik, diasumsikan bahwa data mengikuti distribusi normal. Sebaliknya, Uji non-parametrik digunakan oleh para ahli statistik ketika data tidak mengikuti distribusi normal. Dalam penelitian ini, kami melakukan uji Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan semuanya normal. Justifikasi berikut mendukung uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, seperti yang dinyatakan oleh Suryani dan Hendryadi (2015). Jika nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka data menunjukkan distribusi yang normal. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara tidak normal.

Untuk menguji hipotesis, uji-t digunakan sebagai teknik statistik pilihan. Jika data sesuai dengan distribusi normal, uji statistik parametrik yang sesuai untuk digunakan adalah Paired Sample T-Test (Anam, 2020). Apabila distribusi data tidak normal, maka analisis statistik non-parametrik yang sesuai untuk digunakan adalah Wilcoxon Signed Rank Test, seperti yang ditunjukkan oleh Suryani dan Hendryadi (2015). Prinsip dasar yang mendasari pengambilan keputusan dalam kedua penilaian tersebut adalah ketika hipotesis alternatif (H_a) diterima

dan hipotesis nol (H_0) ditolak apabila hasil signifikansi untuk uji dua sisi (two tailed test) lebih kecil dari 0,05 (Alawiyah, 2021). Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Utara berbeda sebelum dan sesudah pemekaran kabupaten dan kota.

Ketika nilai p-value (two-tailed) melebihi 0,05, hipotesis nol (H_0) dianggap dapat diterima sedangkan hipotesis alternatif (H_a) dianggap tidak dapat diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran Provinsi Kalimantan Utara menjadi beberapa kabupaten dan kota tidak secara signifikan mengubah kinerja keuangan provinsi.



Gambar 2. Kerangka pemikiran

Hipotesis Penelitian

H_0 : tidak ada perbedaan yang nyata dalam kinerja keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara sebelum dan sesudah pemekaran.

H_a : terdapat perbedaan yang nyata dalam kinerja keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara sebelum dan sesudah pemekaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Kalimantan Utara menjadi provinsi ke-34 di Republik Indonesia setelah disahkannya UU No. 20/2012. Struktur asli Kalimantan Utara meliputi Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung, dengan total lima kabupaten dan satu kota. Yurisdiksi Kalimantan Timur pernah diperluas ke wilayah-wilayah ini. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU No. 20/2012, ibukota Kalimantan Utara terletak di Kabupaten Bulungan dan dikenal dengan nama Tanjung Selor.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas wilayah sekitar 75.467,70 kilometer persegi dan terletak pada koordinat geografis 114° 35' 22" - 118° 03' 00" Bujur Timur dan 1° 21' 36" - 4° 24' 55" Lintang Utara. Lebih lanjut, sehubungan dengan batas-batas wilayah provinsi, Provinsi Kalimantan Utara memiliki wilayah laut seluas 11.579 km², yang merupakan 13% dari luas wilayahnya secara keseluruhan. Luas wilayah daratan secara keseluruhan di wilayah Kalimantan Utara adalah:

1. Kabupaten Bulungan memiliki luas wilayah 13.925,79 km²
2. Kabupaten Malinau memiliki luas wilayah 46.620,70 km²
3. Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah 13.841,90 km²
4. Kabupaten Tana Tidung memiliki luas wilayah 4.828,58 km²
5. Kota Tarakan memiliki luas wilayah 250,80 km²

Provinsi Kalimantan Utara secara geografis berbatasan dengan Negara Bagian Sabah (Malaysia) di sebelah utara, Laut Sulawesi di sebelah timur, Provinsi Kalimantan Timur di sebelah selatan, dan Negara Bagian Serawak (Malaysia) di sebelah barat.

Analisis Pendapatan Daerah

Hasil uji normalitas menunjukkan distribusi data yang tidak normal. Oleh karena itu, Wilcoxon Signed Rank Test digunakan sebagai uji statistik non parametrik untuk menguji hipotesis, seperti yang disajikan pada Tabel 1. Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon digunakan

untuk menguji hasil yang menunjukkan bahwa empat rasio tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah pemekaran, sementara lima rasio menunjukkan perbedaan yang signifikan setelah pemekaran daerah. Pemeriksaan terhadap pendapatan daerah telah menghasilkan beberapa metrik, termasuk tingkat desentralisasi, rasio ketergantungan, dan rasio kemandirian. Secara khusus, tampaknya tidak ada perbedaan yang mencolok dalam kinerja sebelum dan sesudah pemekaran daerah sehubungan dengan metrik-metrik ini. Namun, rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio efektivitas PAD menunjukkan adanya variasi kinerja sebelum dan sesudah pemekaran.

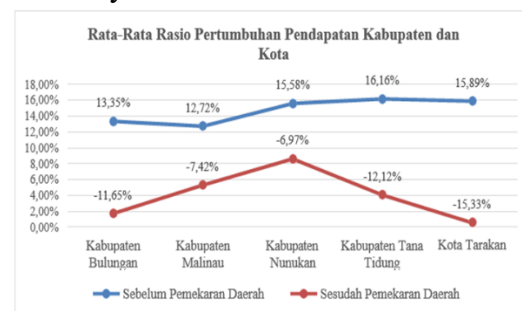
Tabel 1. Uji Wilcoxon Signed Rank Test

No	Rasio	Nilai Signifikansi	Berbeda (✓) tidak (-)
Analisis Pendapatan Daerah			
1	Rasio Pertumbuhan Pendapatan	0,043	✓
2	Rasio Derajat Desentralisasi	0,138	-
3	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	0,080	-
4	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	0,138	-
5	Rasio Efektivitas PAD	0,043	✓
Analisis Belanja Daerah			
1	Rasio Pertumbuhan Belanja	0,043	✓
2	Rasio Kesorasian Belanja Operasi	0,043	✓
3	Rasio Kesorasian Belanja Modal	0,043	✓
4	Rasio Efisiensi Belanja	0,500	-

Sumber: Data Diolah

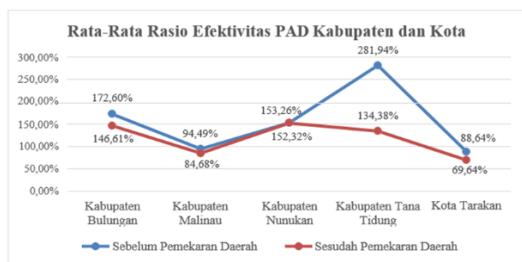
Rasio pertumbuhan pendapatan yang diamati menunjukkan perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. Hal ini disebabkan oleh penurunan total pendapatan pada tahun setelah pemekaran, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seperti yang digambarkan pada Gambar 2. Akibatnya, tingkat pertumbuhan pendapatan menjadi

negatif. Pendapatan dari semua sumber, termasuk pajak dan transfer, diperhitungkan dalam estimasi total pendapatan kabupaten dan kota. Ini termasuk dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian, dana otonomi khusus, bantuan keuangan, pendapatan hibah, dan pendapatan lainnya, serta hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan adanya penurunan yang cukup signifikan pada sumber-sumber pendapatan yang disebutkan di atas. Menurut perkiraan, pembentukan daerah otonom baru memerlukan implementasi penyesuaian untuk mengelola dan mengejar pendapatan daerahnya sendiri secara efektif.



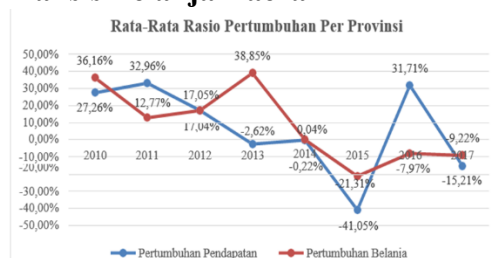
Gambar 3. Rata-Rata Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten dan Kota

Rasio efektivitas Desentralisasi Administrasi Publik (PAD) menunjukkan adanya variasi kinerja keuangan sebelum dan sesudah pemekaran daerah kabupaten dan kota. Berdasarkan nilai rata-rata rasio, terlihat adanya penurunan yang cukup besar. Meskipun terjadi penurunan, intervensi ini dinilai sangat efektif untuk Kabupaten Bulungan, Nunukan, dan Tana Tidung. Selanjutnya, efektivitas di Kabupaten Malinau menurun, sementara efektivitas di Kota Tarakan masih kurang. Oleh karena itu, bahkan setelah pemekaran daerah untuk kabupaten dan kota, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan masih dapat tercapai.



Gambar 4. Rata-Rata Rasio Efektivitas PAD Per Provinsi

Analisis Belanja Daerah

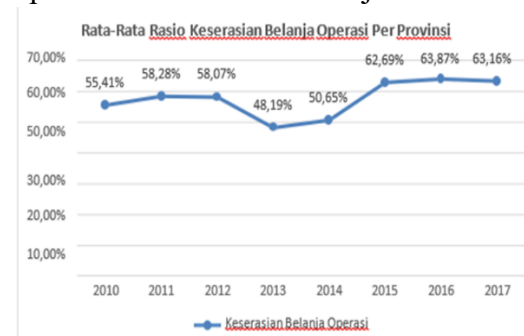


Gambar 5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Per Provinsi

Rasio pertumbuhan belanja terdapat perbedaan kinerja keuangan antara sebelum dan sesudah pemekaran daerah kabupaten dan kota. Terjadi pertumbuhan negatif setelah pemekaran daerah. Pertumbuhan belanja mengimbangi pertumbuhan pendapatan yang juga mengalami pertumbuhan secara negatif untuk seluruh kabupaten dan kota. Pertumbuhan belanja negative bisa diperkirakan karena terjadi efisiensi belanja atau mengimbangi pendapatan yang diperoleh yang mengalami penurunan sejak menjadi provinsi sendiri.

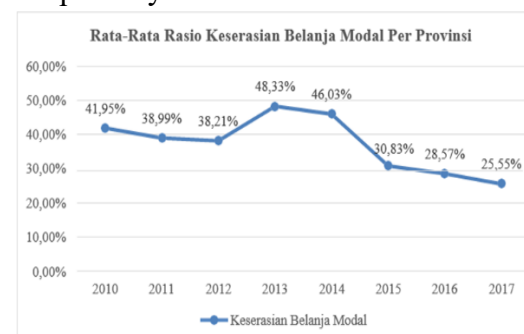
Sebelum dan sesudah pemekaran kabupaten dan kota, kinerja keuangan berbeda dalam hal rasio keserasian pengeluaran operasional. Karena setelah pemekaran daerah, rata-rata realisasi belanja operasi mengalami peningkatan untuk seluruh kabupaten dan kota, yaitu adanya peningkatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja subsidi. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah untuk seluruh kabupaten dan kota didominasi dengan belanja operasi.

Berdasarkan rata-rata, realisasi belanja operasi mendominasi belanja daerah.



Gambar 6. Rata-Rata Rasio Keserasian Belanja Operasi Per Provinsi

Kinerja rasio kecocokan modal berbeda sebelum dan sesudah pemekaran kabupaten dan kota. Karena setelah pemekaran daerah, rata-rata belanja modal mengalami penurunan untuk seluruh kabupaten dan kota. Namun penurunan tersebut masih tetap berada diatas 20% sehingga masih dikatakan baik dimana, proporsi belanja modal pada umumnya yaitu antara 5%-20% dari total belanja daerah (Mahmudi, 2019). Pengamatan tersebut di atas mengindikasikan bahwa berbagai kabupaten dan kota memprioritaskan belanja modal sebagai komponen strategi investasi mereka. Belanja ini dapat mencakup pengeluaran untuk tanah, bangunan, gedung, peralatan, mesin, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya.



Gambar 7. Rata-Rata Rasio Keserasian Belanja Modal Provinsi

PENUTUP Kesimpulan

Penelitian ini melakukan analisis uji-t pada kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Utara, meneliti periode sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. Rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio efektivitas PAD berbeda secara signifikan. Berdasarkan hasil ini, pertumbuhan kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara memiliki dampak yang besar terhadap output ekonomi di daerah tersebut. Rasio ketergantungan dan kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang nyata dalam kinerja keuangan sebelum dan sesudah pemekaran daerah terkait dengan tingkat desentralisasi.

Analisis terhadap pola belanja daerah menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata dalam hasil keuangan sebelum dan sesudah pemekaran kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara. Pertumbuhan belanja operasional dan belanja modal, serta kesesuaiannya, menunjukkan hal ini. Ketika membandingkan kinerja keuangan sebelum dan sesudah pemekaran daerah, pengukuran rasio efisiensi pengeluaran tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik.

Saran

Rekomendasi berikut ini diusulkan untuk pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka melalui optimalisasi sumber daya dan efisiensi belanja daerah. Selanjutnya, para peneliti selanjutnya dapat mengevaluasi kinerja kabupaten berdasarkan sektor-sektor selain keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Alawiyah, S. A., Husniati, H., & Setiawan, H. (2021). Pengaruh Metode Paired Story Telling

- terhadap Keterampilan Berbicara Siswa Kelas IV SDN Gugus 8 Kecamatan Janapria. *Renjana Pendidikan Dasar*, 1(3), 154-159.
- Anam, C. (2020). Jenis uji statistik untuk analisis hasil penelitian. *Berkala Fisika*, 23(4), 115-117.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita: Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi*, 3(1), 64-75.
- Diskominfo. 2013-2018. IPM Provinsi Kalimantan Utara. <https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/www.dpr.go.id>
- Fitriyani, Y., & Febrianti, T. (2020). Penilaian Kinerja Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 3(2).
- Kementerian Keuangan. 2010-2017. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). www.djpk.kemenkeu.go.id
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (4th ed.). Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Pamekas, R. (2013). *Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Permukiman*. Dunia Pustaka Jaya.
- Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 2010-2017. Laporan Realisasi Anggaran (LRA). <https://kaltaraprov.go.id>.
- Putra, B. P., & Hidayah, R. U. (2020). Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan

- Setelah Pemekaran Daerah Sumatera Selatan. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 4(1), 19–26.
- Salim, M. (2019). Analisis Kinerja Keuangan dan Ekonomi Pemerintah Daerah Sebelum dan Setelah Pemekaran. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 2(2), 436–451.
<https://doi.org/10.15294/efficient.v2i2.29162>
- Salim, M. N. (2019). Analisis Kinerja Keuangan dan Ekonomi Pemerintah Daerah Sebelum dan Setelah Pemekaran (Studi Kasus Pemekaran di Papua). *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 2(2), 436–451.
- Sidiq, M. (2016). *Analisis Flypaper Effect Berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (Ikk) Pada Kabupaten Dan Kota Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Lampung).
- Sucandrawati, N. K. A. (2016). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah. (Tesis). *Universitas Lampung, Bandar Lampung*.
- Suryani, & Hendryadi. (2015). *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam (1st ed.)*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Syachbrani, W., & Akbar, R. (2013). Faktor-faktor teknis dan keorganisasian yang memengaruhi pengembangan sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 3(2).
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Wisudaningtyas, A., & Sugiarti, L. (2022). Pengaruh Pelatihan Motivasi Dengan Metode Eksperimen Terhadap Prestasi Belajar Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Education And Development*, 10(1), 284–288.